

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan dalam Bab II sampai Bab IV maka kesimpulan yang dapat diambil yang memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam Bab I adalah:

1. Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada harmonisasi dari pengaturan hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan sendiri merupakan konsep yang pertama kali muncul dalam GDPR milik Uni Eropa yang memberikan hak kepada setiap subjek data untuk memintakan penghapusan dari data yang sudah tidak diperlukan. Indonesia pertama kali mengadopsi konsep ini ke dalam Perubahan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dimana dijelaskan terkait hak dari setiap subjek data untuk menghapus data yang dianggap sudah tidak relevan. Muncul berbagai permasalahan dari pengaturannya ini karena tidak ada penjelasan terkait batasan dari data yang tidak relevan tersebut. Setelah diatur dalam UU ITE, hak untuk dilupakan kemudian kembali diatur di dalam UU PDP dengan lebih memfokuskan pada perlindungan dari data pribadi. Selain itu, dalam UU TPKS, hak untuk dilupakan dimintakan oleh Jaksa kepada Pemerintah Pusat. Perbedaan ini menunjukkan disharmonisasi dari pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia. Perbedaan ini sendiri juga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hak untuk dilupakan sebagai perlindungan data pribadi, dalam hal ini bagi korban *revenge porn* yang hendak melakukan penghapusan.
2. Hak untuk dilupakan dapat digunakan sebagai perlindungan bagi korban *revenge porn*. Pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan tindakan menyebarkan konten-konten seksual yang diperoleh saat korban dan pelaku ada dalam sebuah hubungan dimana penyebaran dilakukan sebagai pembalasan dendam dari pelaku kepada korban yang ditujukan untuk mengancam atau

membuat malu korban. *Revenge porn* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak privasi. Hak untuk dilupakan adalah hak yang diberikan kepada setiap subjek data untuk melakukan penghapusan dari data pribadi yang tersebar di Internet sebagai jaminan atas hak privasi seseorang. Pengaturan hak untuk dilupakan yang ada dalam UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS dapat digunakan sebagai perlindungan hukum korban *revenge porn* karena setelah dilakukan penghapusan bisa menghilangkan kekhawatiran korban atas konten foto/video yang masih terus tersebar dan menjadi catatan gelap bagi korban.

## 5.2 Saran

1. Harus ada harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hak untuk dilupakan dengan membuat sebuah aturan khusus yang memberikan pengertian, batasan, syarat-syarat, juga mekanisme oleh pemerintah pusat, baik lewat undang-undang ataupun segera mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU PDP dan UU TPKS yang bisa beroperasi dan bukan hanya menjadi sebuah konsep.
2. Dalam penerapannya, hak untuk dilupakan dapat digunakan sebagai perlindungan dari hak privasi, namun masih dilihat dari pelaksanaannya, hak ini belum banyak dipakai khususnya dalam kasus *revenge porn* padahal konsep ini bisa menjadi perlindungan dari privasi korban. Sehingga selain harmonisasi oleh pemerintah, konsep ini juga perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan konsep ini, khususnya korban-korban dari *revenge porn* yang meskipun pelakunya sudah dipidana, konten-konten seksual dirinya yang tersebar tidak berhenti penyebarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
- Agus Raharjo. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya. 2002.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. 2015
- Jimly Asshidiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Tempo Publishing, 2022.
- Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996
- Sinta Dewi Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama. 2015
- Soegiyono, et.al. *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan: Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Wahiduddin Adams. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012.

### **JURNAL**

- Ahmad M Ramli, et.al, "Legal Aspect of The Right to Be Forgotten (RTF) On Social Media In Indonesia", *Technology and Economics Law Journal*, (Vol 1 No 2), 2022.
- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (Vol.3. No.7), 2022.
- Baratadewa Bima Bayusata dan Yohanes Suwanto. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (Vol 1 No 1), 2022.

- Benedicta Alodia Santoso dan Michael Bezaleel, "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", *Andharupa (Vol 04 No 1)*, 2018.
- Danielle Keats Citron dan Marry Anne Franks. "Criminalizing Revenge porn." *Wake Forest Law Review* 49, (Issue 345), 2014.
- Dawn C. Nunziato, "The Fourth Year of Fear of Forgetting: The Getting: The Troubling Expansion of the Right to Be Forgotten" *GWU Law School Public Law Research Paper (No. 2018-30)*, 2018
- Eko Raharjo, et.al. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023
- Evi Hastuti, et.al, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi" *Gorontalo Law Review (Vol 3 No 2)*, 2020.
- Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno dan Joko Setiyono, Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional, *Diponegoro Law Journal (Vol 5 No 3)*, 2016.
- Hwian Christianto. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (Vol 32 No 2)*, 2020.
- Indriyatno Seno Adji, "Overheidsbeleid" & Asas "Materiele Wederrechtelijkheid" Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional (Vol 2 No 3)*, 2005
- Ita Iya Pulina Perangin-angin. "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia." *Diponegoro Law Journal (Vol.8 No.1)*, 2019.
- Jeffrey Rosen. "The Right to Be Forgotten" *Stanford Law Review Online, (Vol.64)*, 2012.
- Jerry Kang. "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Stanford Law Review (Vol 50)*, 1998.
- Karina Permata et.al, "Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban" *Jurnal Pendidikan Tambusai, (Vol 8 No 1)*, 2024.
- Karunia Fitri Ramdani dan M. Darin Arif u'allifin. "Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan (Vol. 3 No.1)*, 2023.
- Maskun, et.al. "Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer." *MMH, Jilid 42 (No. 4)*, 2013.
- Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia" *Jurnal Cakrawala Hukum, (Vol 10 No. 2)*, 2019.
- Ni Putu Winny Arisanti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa (Vol. 9 No. 5)*, 2021

- Sayid Mohammad Rifqi Noval dan Ahmad Jamaludin, “Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman” *Jurnal Legislasi Indonesia (Vol 17 No.3)*, 2020
- Shigenori Matsuri. “The Criminalization of Revenge Porn in Japan.” *Washington International Law Journal Association, (Vol. 24 No. 2)*, 2015.
- Sintong Arion Hutapea. "Right To Be Forgotten Sebagai Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi." *Jurnal Jurisprudencia, (Vol.4 No.1)*,2021.
- Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal Becoss (Vol.1 No.1)*, 2019
- Tyrone Kirchengast, “The Limits of Criminal Law and Justice: ‘Revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim ” *UniSA Student Law Review 2*, 2016.
- Zalabila Armadani Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum (Vol 8 No 1)*, 2022.

### **WEBSITE**

- Ady Thea DA. 2023. “Perlunya Harmonisasi Pengaturan the Right to Be Forgotten.” *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-harmonisasi-pengaturan-the-right-to-be-forgotten-lt63fc6617227cb/?page=1>
- Aris Rivaldo. 2023. “Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui.” *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui>.
- Bevan Hurley. 2018. “First Kiwi convicted of revenge porn warns 'jilted, jealous' men to stay off social media”, <https://www.stuff.co.nz/national/crime/101435599/first-kiwi-convicted-of-revenge-porn-warns-jilted-jealous-men-to-stay-off-social-media>
- Carlos Roy Fajarta. 2024. “Sebar Video Porno Mantan Pacar di Medsos, DJ East Blake Ditangkap Polisi.” *SindoNEWS* <https://metro.sindonews.com/read/1369741/170/sebar-video-porno-mantan-pacar-di-medsos-dj-east-blake-ditangkap-polisi-1714633550>
- Clarity in Privacy, *History of the Right to be Forgotten*, <https://www.clarip.com/data-privacy/right-forgotten-history/>
- CPS News Centre. 2022. “Reality TV star guilty of posting 'revenge porn',” <https://www.cps.gov.uk/east-england/news/reality-tv-star-guilty-posting-revenge-porn>
- Kominfo. 2018. “Hak untuk Dilupakan, Kominfo Libatkan Mahkamah Agung” [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13532/hak-untuk-dilupakan-kominfo-libatkan%20mahkamah-agung/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13532/hak-untuk-dilupakan-kominfo-libatkan%20mahkamah-agung/0/sorotan_media)
- Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>
- Kurg, E.G. 2002. “World Report on Violence and Health” *World Health Organization Chapter 6 Sexual Violence. 2002* [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1)
- Lina Miftahul Jannah. 2022. “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*.

- <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>
- Lucy Clarke-Billings. 2016. "Revenge Porn Laws in Europe, U.S. And Beyond" Newsweek. <https://www.newsweek.com/revenge-porn-laws-europe-us-and-beyond-499303>
- Masum Rangkuti. 2023. "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh." Fakultas Hukum - UMSU. 24 <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.
- Maya Oppenheim. 2018. "One of first known victims of revenge porn reveals how stalking and abuse forced her to change her identity" Independent. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/revenge-porn-lena-chen-break-up-abuse-boyfriend-harvard-berlin-healher-a8410621.html>
- MNC Portal. 2021. "Deretan Kasus Revenge Porn di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus." <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus>.
- Mochamad Januar Rizki. 2023. "Empat Permasalahan Aturan Right to Be Forgotten." HukumOnline <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-permasalahan-aturan-right-to-be-forgotten-lt63fcb10898c04/?page=1>
- Muhammad Ahsan N. 2023. "Dugaan Revenge Porn Mantan di Balik Kasus Video Syur Mirip Rebecca Klopper." detikHOT. <https://hot.detik.com/celeb/d-6995143/dugaan-revenge-porn-mantan-di-balik-kasus-video-syur-mirip-rebecca-klopper>.
- Nafis Abdulhakim. 2023. "Foto Asusila Tersebar, Siswi SMA di NTT Akhiri Hidup, Polisi Periksa 2 Orang, 'Diduga Penyebar'" TribunNews. <https://trends.tribunnews.com/2023/10/02/foto-asusila-tersebar-siswi-sma-di-ntt-akhiri-hidup-polisi-periksa-2-orang-diduga-penyebar?page=all> ,
- Sen Nguyen. 2019. "What is 'revenge porn' and are there laws to protect you? Here's what you need to know" CNN. <https://edition.cnn.com/interactive/asequals/revenge-porn-protect-yourself-as-equals-intl-cmd/>
- Siti Nurhayati. 2023. "*Kronologi Kasus Alwi Husen Maolana, Diduga Lakukan Ancaman hingga Revenge Porn terhadap Korban di Pandeglang*" Kilat. <https://www.kilat.com/nasional/8449283002/kronologi-kasus-alwi-husen-maolana-diduga-lakukan-ancaman-hingga-revenge-porn-terhadap-korban-di-pandeglang>
- Training Institute on Strangulation Prevention, "Revenge Porn: The Latest Research And Law Enforcement Efforts", <https://www.strangulationtraininginstitute.com/revenge-porn-the-latest-research-and-law-enforcement-efforts/>
- UNC Pembroke, "Consent and Coercion Discussed", <https://www.uncp.edu/resources/title-ix-clery-compliance/sexual-misconduct/consent-and-coercion-discussed#:~:text=Previous%20consent%20does%20not%20imply,be%20withdrawn%20at%20any%20time>.
- Yoyok Agusta. 2021. "Marah Diputus Cinta Sang Pacar, Pria Asal Gresik Sebar Video Syur Mantan ke Medsos dan Situs Dewasa", Okezone. <https://news.okezone.com/read/2021/06/28/340/2431898/marah-diputus->

[cinta-sang-pacar-pria-asal-gresik-sebar-video-syur-mantan-ke-medsos-dan-situs-dewasa](#)

### **KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL**

*Data Protection Act 2018, UK Public General Acts, Section 3*

*Factsheet on the Right to be Forgotten Ruling (C-131/12)*

*Regulation (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)*

*Universal Declaration of Human Rights*

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Grand Chamber, Document 62012CJ0131, 13 Mei 2014 antara Google Spain SL, Google Inc. vs AEPD, Mario Costeja Gonzalez

Putusan Grand Chamber, Dokumen 62020CJ0460, 8 Desember 2022 antara TU dan RE vs Google LLC

Pengadilan Tinggi Banten, Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/ PT BTN

Pengadilan Negeri Pandeglang Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl